

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



Perlu Langkah Cepat Pulihkan Industri TPT Nasional

Dalam 2 tahun terakhir industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah berada dalam tekanan besar yang berimbas pada 60-an perusahaan gulung tikar dan 250 ribu tenaga kerja di PHK. Harapan perbaikan bertumpu pada pemerintah baru, ditengah perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Meski publik melihat bahwa sedang ada perbaikan besar-besaran ditubuh birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kalangan tekstil tengah menunggu dan berharap ada langkah signifikan yang segera diambil Presiden Prabowo untuk memperbaiki sektor manufaktur padat karya yang masih menjadi andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan domestik hingga penghasil devisa ekspor.

Ditengah hiruk pikuk perang dagang dan kondisi geo politik yang menyebabkan tingginya hambatan ekspor, maka pasar domestik menjad tumpuan utama sektor TPT

nasional. Hanya saja permasalahan banjirnya barang impor khususnya importasi ilegal masih menjadi permasalahan klasik yang semakin mengganas.

Untuk mengatasi masalah ini maka kalangan tekstil sangat memerlukan intervensi Presiden Prabowo mengingat banyak pihak terlibat dan berkepentingan terhadap praktik ilegal ini. Untuk itu sebagai pemain disektor ini, mari kita bersama mendorong perbaikan dan tetap menyuarakannya agar pemerintah segera turun tangan menjalankan agenda pemulihan industri TPT Nasional.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-87

Berita Utama

- Industri Tekstil Tertekan dari Berbagai Arah, Pelaku Usaha Serukan Kebijakan Seimbang

Berita Terbaru

- Dari Krisis ke Kebangkitan: Duniatex Rekrut Ribuan Karyawan di Tengah Lesunya Industri Tekstil
- Kerugian Membengkak di Tengah Kenaikan Pendapatan, Argo Pantes (ARGO) Merugi Rp 9,45 Miliar pada Kuartal I 2025
- Kelesuan Pasca-Lebaran: Industri Sandang dan Pangan Terhimpit Tekanan Ekonomi
- Produk Kimia Tekstil Kabupaten Bandung Tembus Pasar Ekspor Amerika dan Bangladesh
- Kolaborasi Strategis Perbankan dan Industri Tekstil untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- Langkah Nyata DPR Dukung Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Global

- Dorong Efisiensi dan Daya Saing, DPR Desak Evaluasi Klasifikasi Impor Bahan Baku Tekstil
- APSyFI Tegaskan BMAD Sebagai Upaya Pemulihan Industri, Bukan Ancaman
- Ketegasan Pemerintah Diuji dalam Perlindungan Industri Tekstil Nasional dari Serbuan Impor Dumping
- Dorongan Gas Murah untuk Industri Tekstil Demi Hadapi Serbuan Impor dan Tuntutan Energi Hijau
- Merayakan Jejak Budaya Melalui Wastra di Museum Tekstil Jakarta
- Jerat Hukum Kredit Macet Sritex: Eks Pejabat Bank Diperiksa Kejagung
- Ancaman PHK Massal di Industri Tekstil: Impor Ilegal Jadi Biang Keladi
- Banjir Impor Ilegal Ancam Nasib Jutaan Pekerja Tekstil
- Intresse, Wajah Baru Modest Fashion Lokal Berbasis Teknologi Tekstil

BERITA UTAMA

Industri Tekstil Tertekan dari Berbagai Arah, Pelaku Usaha Serukan Kebijakan Seimbang



Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tengah menghadapi tekanan hebat akibat tantangan dari dalam dan luar negeri. Penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat yang mengenakan tarif hingga 32 persen pada sejumlah produk tekstil, menjadi salah satu

faktor utama yang melemahkan kinerja sektor ini.

Situasi semakin rumit dengan wacana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Benang Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY), dua bahan baku penting dalam industri tekstil berbasis poliester. Kedua jenis benang ini merupakan komponen utama dalam proses produksi kain sintetis dan produk tekstil lainnya, sehingga keberadaannya yang stabil dan terjangkau sangat krusial bagi industri hilir seperti garmen, konveksi, dan tekstil rumah tangga.

Para pelaku industri menyoalakan kekhawatiran bahwa kapasitas produksi dalam negeri untuk POY dan DTY belum cukup kuat, baik dari segi volume, kualitas, maupun harga. Mereka menilai bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan seperti BMAD memang penting, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada sektor hilir yang padat karya.

“Industri sangat memahami pentingnya instrumen trade remedies seperti BMAD. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hulu dan hilir,” ujar Direktur PT Sipatamoda Indonesia, Ian Syarif, dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 7 Mei 2025.

Berdasarkan data dari sejumlah perusahaan tekstil nasional, pengenaan bea masuk yang tinggi terhadap POY dan DTY dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan, yang pada akhirnya menggerus daya saing produk tekstil Indonesia di pasar lokal dan global. Dalam laporan akhir penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), bahkan diusulkan tarif BMAD hingga 42,30 persen.

Sebagai bentuk keprihatinan, lebih dari 101 perusahaan TPT nasional telah menandatangani petisi kepada Presiden Prabowo Subianto, mendesak agar kebijakan pengendalian impor dilakukan secara proporsional, dengan memperhitungkan kapasitas produksi dalam negeri serta kebutuhan bahan baku sektor hilir. Mereka berharap adanya kebijakan yang berbasis data dan mampu menjaga keseimbangan antarsegmen industri.

“Kami percaya, dengan kebijakan yang akomodatif dan berbasis data, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keberlanjutan ekosistem industri tekstil secara menyeluruh,” tambah Ian.

Industri TPT sendiri berperan besar dalam perekonomian nasional dengan menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja langsung dan menjadi kontributor utama ekspor nonmigas. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara sektor hulu dan hilir dinilai sebagai kunci untuk menghadapi tantangan global dan menjaga ketahanan industri dalam negeri.

**The Introduction ;
A history, journey and development
of the Indonesia
textile and garment industry**

INDOTEXTILES TV

The Indonesia Textiles, Apparel & Fashion Community Reference





BERITA TERBARU

Dari Krisis ke Kebangkitan: Duniatex Rekrut Ribuan Karyawan di Tengah Lesunya Industri Tekstil

Industri tekstil Indonesia telah mengalami keterpurukan selama tiga tahun terakhir akibat tekanan ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19. Namun, di tengah situasi tersebut, Duniatex berhasil menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi luar biasa. Setelah sempat terpaksa merumahkan ribuan karyawan selama pandemi demi mempertahankan operasional perusahaan, kini Duniatex bangkit dan mulai berekspansi besar-besaran dengan merekrut lebih dari 5.000 karyawan baru.

Direktur Duniatex Group, Yohanes Hendrawan, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Duniatex untuk mendukung kebangkitan industri tekstil nasional sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Jumlah karyawan Duniatex kini mencapai sekitar 18.000 orang, meningkat signifikan dari sekitar 13.000 pada masa pandemi.

Duniatex juga terus melakukan berbagai inovasi dalam produksinya. Perusahaan yang kini menjadi pabrik pemintalan terbesar di Indonesia, mengoperasikan lebih dari dua juta spindel dan menggunakan tiga teknik pemintalan utama, yaitu ring spun, vortex, dan open end. Hasil produksinya pun sangat beragam, mencakup berbagai jenis benang seperti Cotton Combed, Viscose (Rayon), hingga benang daur ulang atau recycled yarn yang saat ini menjadi sorotan dalam tren keberlanjutan industri tekstil.

Produk-produk Duniatex telah menembus pasar global dan digunakan sebagai bahan baku di berbagai sektor industri tekstil dalam maupun luar negeri. Dengan standar produksi bertaraf internasional, Duniatex terus menjaga daya saing melalui inovasi dan efisiensi, yang turut mempercepat proses pemulihan bisnis pascapandemi.



Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut mengapresiasi langkah Duniatex yang berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan. Ia menilai kemampuan perusahaan dalam menentukan langkah strategis saat menghadapi krisis menjadi kunci utama keberhasilan Duniatex untuk bangkit dan berekspansi. Agus berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi pelaku industri lainnya agar tidak ragu mengambil keputusan penting demi kelangsungan bisnis.

Kebangkitan Duniatex menjadi bukti nyata bahwa dengan strategi yang tepat dan

dukungan berbagai pihak, industri tekstil Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Di tengah ketidakpastian ekonomi, perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi tetap dapat tumbuh dan memberi kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Kerugian Membengkak di Tengah Kenaikan Pendapatan, Argo Pantes (ARGO) Merugi Rp 9,45 Miliar pada Kuartal I 2025



PT Argo Pantes Tbk (ARGO), emiten yang bergerak di sektor tekstil dan

pakaian jadi, mencatat lonjakan kerugian yang signifikan pada kuartal I 2025. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, ARGO tetap harus menanggung kerugian komprehensif yang membengkak hampir sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga Maret 2025, ARGO mencetak pendapatan bersih sebesar Rp 30,43 miliar. Angka ini naik 24,02% dari Rp 24,53 miliar pada kuartal I 2024. Namun, kerugian komprehensif perusahaan justru melonjak tajam sebesar 895,55%, dari Rp 949,15 juta menjadi Rp 9,45 miliar.

Yang menarik, lonjakan kerugian tersebut terjadi meskipun beban pokok pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Beban ini tercatat turun 4,88% menjadi Rp 16,04 miliar dari sebelumnya Rp 16,85 miliar, yang seharusnya dapat meringankan tekanan terhadap laba perusahaan.

Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan perbaikan signifikan. ARGO membukukan arus kas operasi positif sebesar Rp 19,26 miliar, berbalik dari posisi negatif Rp 6,44 miliar pada kuartal I 2024. Perbaikan ini mencerminkan lonjakan likuiditas operasional hingga 399,94%.

Dari sisi neraca, total aset ARGO per akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 1,14 triliun, naik tipis 1,28% dibandingkan dengan akhir 2024 yang sebesar Rp 1,12 triliun. Namun, total liabilitas perusahaan juga meningkat 2,44% menjadi Rp 1,02 triliun, dari sebelumnya Rp 998,45 miliar.

Sementara itu, pergerakan saham ARGO di pasar juga menunjukkan tren negatif. Pada perdagangan Jumat, 9 Mei 2025, harga sahamnya turun 4,76% ke level Rp 600 per lembar. Dalam sebulan terakhir, saham ARGO tercatat telah terkoreksi sebesar 6,98%.

Kelesuan Pasca-Lebaran: Industri Sandang dan Pangan Terhimpit Tekanan Ekonomi

Momentum Lebaran yang biasanya menjadi penggerak utama konsumsi nasional gagal mengangkat performa sektor sandang dan pangan pada tahun ini. Alih-alih mendapat dorongan permintaan seperti tahun-tahun sebelumnya, para pelaku usaha justru menghadapi kontraksi berkepanjangan bahkan setelah Ramadan usai. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap kelangsungan usaha hingga akhir tahun.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, menyebut suasana pasca-Lebaran kali ini jauh dari ekspektasi. Menurutnya,

tidak ada kegembiraan di kalangan pelaku industri, kontras dengan biasanya di mana hari raya menjadi momen panen. Ia menggambarkan kondisi ini dengan pernyataan yang lugas, “Lebaran kali ini kita sulit tersenyum. Seolah-olah tidak ada Lebaran.”



Adhi menyoroti jeda panjang antara momen konsumsi besar, dari akhir tahun hingga Lebaran, yang kini diperpanjang lagi oleh minimnya prospek perayaan nasional hingga kuartal keempat. Hal ini, menurutnya, menggerus arus kas dan memperpanjang tekanan terhadap kinerja pelaku industri. Ia memperingatkan bahwa tanpa kebijakan stimulus dari pemerintah untuk mengerek daya beli masyarakat, potensi koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar.

Tak hanya sektor makanan dan minuman, tekanan yang lebih dalam juga dirasakan oleh industri sandang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menilai kondisi saat ini bahkan lebih berat dibandingkan dengan era krisis 1990-an. Ia mengkritisi kebijakan pelonggaran impor yang dinilai tidak selektif, membuka jalan masuknya barang murah dari luar negeri dan mengancam eksistensi industri tekstil domestik.

Menurut Jemmy, apabila barang-barang dari luar negeri terus masuk tanpa kontrol ketat, harga pasar dalam negeri akan terganggu dan pelaku industri lokal semakin tertekan. Lebih

dari itu, situasi ini dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak mampu bertahan di tengah persaingan yang tidak seimbang.

Polemik tersebut mengarah pada revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan impor. Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menata ulang delapan sektor terdampak, termasuk tekstil. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat banyak. Wacana pencabutan Permendag 8 menjadi salah satu langkah yang sedang dikaji, mengingat aturan ini diduga turut memicu gejolak ketenagakerjaan di sejumlah sektor.

Di tengah tekanan global dan ketidakpastian kebijakan, pelaku industri berharap agar pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor sandang dan pangan, yang menjadi pilar penting ekonomi nasional. Tanpa dukungan konkret, sektor-sektor ini terancam semakin terpuruk dalam waktu dekat.

Produk Kimia Tekstil Kabupaten Bandung Tembus Pasar Ekspor Amerika dan Bangladesh



Kabupaten Bandung kembali mencatat prestasi

membanggakan di sektor perdagangan internasional dengan keberhasilan ekspor produk kimia tekstil khusus ke pasar Amerika Serikat dan Bangladesh. Produk yang dikirim berupa chemical textile auxiliary, yaitu bahan

kimia pendukung proses produksi tekstil, dilepas langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna pada Kamis, 15 Mei 2025, di PT Bozzetto Indonesia yang berlokasi di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran.

Pengiriman kali ini mencakup volume 72.00 cbm dengan nilai sebesar USD 49.589,00. Ini menjadi kelanjutan dari pencapaian ekspor produk sejenis pada tahun 2024 yang berhasil menembus angka USD 1,68 juta lebih. Capaian ini menunjukkan kekuatan industri lokal dalam menembus pasar global dan membuktikan bahwa sektor kimia tekstil di Kabupaten Bandung memiliki daya saing tinggi di kancah internasional.

Bupati Bandung menyampaikan apresiasi atas kinerja PT Bozzetto Indonesia yang dinilai berhasil mengembangkan potensi daerah sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bandung dalam rantai pasok global. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen penuh untuk mendukung dan membina perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, terlebih dalam situasi ketidakpastian global akibat perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dukungan tersebut, menurut Bupati, menjadi bagian dari strategi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor sebagai upaya nyata untuk menambah devisa negara dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Potensi daerah yang kaya akan sumber daya dan komoditas beragam diharapkan bisa menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah daerah pun mendorong seluruh pelaku usaha agar lebih

jeli dalam melihat peluang ekspor dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

Keberhasilan PT Bozzetto Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di wilayah tersebut untuk tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga berani melangkah ke pasar internasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sinergi antara pelaku usaha, Kabupaten Bandung diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekspor nonmigas di Indonesia.

Kolaborasi Strategis Perbankan dan Industri Tekstil untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya peran sektor jasa keuangan, terutama perbankan, dalam memperkuat pembiayaan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam acara konsinyering bersama kementerian dan pelaku industri TPT yang digelar di Jakarta pada Jumat, 16 Mei 2025.



Dian menyampaikan bahwa sinergi antara industri perbankan dan pelaku industri TPT harus diperkuat agar penyaluran pembiayaan dapat lebih tepat sasaran serta mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa

perluasan akses pembiayaan harus sejalan dengan penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan.

Data OJK menunjukkan bahwa hingga Maret 2025, kredit yang disalurkan kepada industri TPT dan alas kaki mencapai Rp160,41 triliun, atau setara 2,03 persen dari total kredit perbankan nasional. Sementara itu, industri TPT mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,64 persen secara tahunan pada periode yang sama, dengan kontribusi 1,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dian melihat potensi besar pada industri TPT nasional, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan struktural yang masih membayangi, seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan pada pasar ekspor tertentu. Untuk itu, ia mengusulkan pendekatan kolaboratif melalui konsep Indonesia Incorporated, yakni sinergi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah guna mengatasi hambatan tersebut secara komprehensif.

Di sisi lain, kondisi industri tekstil saat ini sedang mengalami tekanan, terutama akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wiraswasta, menyatakan bahwa ekspor menjadi semakin sulit, sementara pasar domestik juga belum memberikan kepastian yang menggembirakan.

Redma juga menyoroti penurunan dua indikator penting, yaitu Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Pada April 2025, PMI manufaktur turun ke level 46,7 yang menandakan zona kontraksi, sedangkan IKI berada di angka 51,9 persen.

Menurutnya, kondisi ini menambah beban bagi industri tekstil nasional, yang kini menghadapi tantangan dari sisi permintaan dan tekanan pasar secara bersamaan.

Langkah Nyata DPR Dukung Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Global



Perhatian terhadap perkembangan industri tekstil nasional yang sarat akan tenaga kerja

kembali ditegaskan melalui kunjungan lapangan oleh Komisi XI DPR RI ke sejumlah perusahaan tekstil hilir di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, Jumat, 16 Mei 2025. Dalam kunjungan ini, anggota Komisi XI, Mohamad Hekal, menegaskan pentingnya melihat langsung kondisi industri padat karya yang kini tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai tantangan eksternal dan internal.

Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada 2024 industri tekstil menyerap 957.122 tenaga kerja, sementara industri pakaian menampung hingga 2.916.005 orang. Sayangnya, angka ini mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,5 persen dan 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hekal menyampaikan bahwa penurunan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan industri yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

Menurut Hekal, tekanan terhadap industri tekstil semakin besar akibat kebijakan tarif

impor dan perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Peningkatan tarif yang signifikan membuat ekspor tekstil Indonesia terhambat, sementara di sisi lain, sektor ini juga telah lama dihantui berbagai hambatan struktural seperti ketersediaan bahan baku yang tidak stabil, harga bahan yang tinggi, serta masuknya produk pakaian jadi impor ke pasar domestik.

Ia menekankan perlunya pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku agar pelaku usaha, khususnya sektor menengah dan kecil seperti garmen, konveksi, serta tekstil rumah tangga, tidak semakin tertekan dan berujung pada pemutusan hubungan kerja massal atau kebangkrutan. Potensi dalam negeri yang sangat besar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar industri padat karya ini bisa bangkit kembali.

Lebih lanjut, Hekal menyatakan bahwa komitmen Presiden dalam menghidupkan kembali industri padat karya termasuk tekstil harus diikuti oleh langkah konkret baik dari pemerintah maupun DPR. Melalui kunjungan ini, pihak legislatif ingin memastikan apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi kelompok industri yang menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhannya agar bisa menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Di sisi lain, peran Bea dan Cukai juga mendapat sorotan dalam upaya melindungi pasar tekstil domestik. Hekal menyebut pihaknya telah meminta jajaran Bea Cukai untuk menjaga pintu-pintu masuk Indonesia dari produk tekstil ilegal yang selama ini kerap membanjiri pasar dalam negeri. Ia menegaskan bahwa keberadaan produk ilegal menjadi salah satu penyebab utama lesunya pasar tekstil lokal dan tutupnya sejumlah usaha kecil.

Komitmen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun disampaikan secara langsung oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan, Padmoyo Tri Wikanto, yang menyatakan siap mendukung pertumbuhan industri tekstil nasional dengan menjaga integritas kebijakan dan pengawasan pintu masuk barang. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat, Finari Manan, yang menyatakan bahwa pihaknya telah menyaksikan secara langsung pentingnya peran industri ini dalam menciptakan lapangan kerja di Jawa Barat.

Melihat potensi pasar dalam negeri yang besar dengan jumlah penduduk hampir mencapai 300 juta jiwa, industri tekstil sebenarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha dalam negeri, industri tekstil Indonesia diharapkan mampu bangkit dari tekanan dan kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional.



Dorong Efisiensi dan Daya Saing, DPR Desak Evaluasi Klasifikasi Impor Bahan Baku Tekstil

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mendorong evaluasi terhadap kebijakan impor bahan baku industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya dalam kategori pengawasan yang ditetapkan oleh Bea Cukai. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik

Komisi XI ke PT Budi Agung Sentosa, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (16/5).

Dalam kunjungannya, Fathi mengapresiasi eksistensi pabrik TPT yang masih bertahan dan menunjukkan kinerja positif. Ia mengungkapkan bahwa anggapan banyaknya pabrik tutup karena maraknya impor ilegal tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, penurunan kinerja industri lebih disebabkan oleh strategi bisnis yang kurang tepat dan penggunaan teknologi produksi yang sudah usang.

Tantangan terbesar yang dihadapi industri TPT, kata Fathi, bukan semata pada faktor eksternal, melainkan pada efisiensi produksi yang rendah akibat penggunaan mesin-mesin lama yang tak mampu bersaing dengan teknologi modern. Hal ini menyebabkan biaya produksi membengkak dan daya saing menurun.



Ia juga menyoroti klasifikasi pengawasan impor bahan baku, terutama polyester, yang hingga kini masih masuk dalam kategori barang merah oleh Bea Cukai. Menurutnya, hal ini tidak tepat karena bahan polyester merupakan bahan baku utama yang sebagian besar masih harus diimpor oleh pelaku industri dalam negeri. Perlakuan ini berdampak pada peningkatan biaya dan keterlambatan proses produksi.

Fathi menegaskan pentingnya membedakan antara impor produk jadi dan impor bahan baku, karena pengawasan yang terlalu ketat

terhadap bahan baku justru menghambat pertumbuhan industri nasional. Ia mendesak Bea Cukai untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut demi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Dalam pernyataannya, Fathi menekankan peran strategis Bea Cukai dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Ia berharap adanya relaksasi serta kebijakan yang lebih adaptif dalam pengawasan impor, khususnya untuk bahan baku yang bersifat strategis bagi industri dalam negeri.

APSyFI Tegaskan BMAD Sebagai Upaya Pemulihan Industri, Bukan Ancaman

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) membantah anggapan bahwa rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filamen sintetik asal Tiongkok akan menghancurkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menilai kebijakan ini justru akan memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri agar mampu bersaing secara adil dan sehat.



Redma menyatakan bahwa pengenaan BMAD atas produk partially oriented yarn (POY) dan drawn textured yarn (DTY) akan mendorong pemulihan industri lokal. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan

penghalang, melainkan stimulus yang dapat mendorong substitusi impor hingga 140.000 ton, serta memungkinkan peningkatan produksi nasional hingga 200.000 ton, seiring dengan beroperasinya penuh tiga pabrikan dalam negeri. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu ekspor karena tidak berlaku untuk perusahaan di kawasan berikat atau yang menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Menurut Redma, saat ini industri benang nasional mengalami penurunan utilitas akibat praktik dumping dari produk impor asal Tiongkok. Empat perusahaan anggota APSyFI telah terdampak, satu di antaranya bahkan tutup permanen, satu tutup sementara, dan dua lainnya hanya beroperasi 40 persen dari kapasitas. Kondisi ini, kata Redma, dibuktikan dari hasil temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang mencerminkan situasi riil di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa tiga dari empat perusahaan yang terdampak telah bersiap untuk mengaktifkan kembali seluruh lini produksinya, dan satu perusahaan asal Tiongkok akan berinvestasi membangun fasilitas produksi polyester di Indonesia. Namun, langkah ini masih menunggu kejelasan atas keputusan penerapan BMAD. Total investasi yang direncanakan mencapai 250 juta dolar AS. Dengan reaktivasi tersebut, pasokan POY diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Redma juga menyebut bahwa praktik anti-dumping merupakan kebijakan yang lazim di banyak negara, termasuk Vietnam yang baru-baru ini memberlakukan BMAD atas produk asal Tiongkok.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Fernando Emas, yang menilai bahwa hasil penyelidikan dan rekomendasi KADI atas produk benang filamen dapat membebani

industri tekstil nasional. Ia menyoroti besaran BMAD yang diusulkan, yaitu antara 5,12% hingga 42,3%, yang menurutnya terlalu tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi sektor hulu yang bergantung pada bahan baku seperti POY.

Fernando mengungkapkan bahwa kebutuhan POY nasional mencapai 257,68 juta kilogram per tahun, sedangkan pasokan hanya 141,92 juta kilogram. Dengan selisih sekitar 115 juta kilogram, ia khawatir penerapan BMAD akan menghambat produksi dan memicu efek domino terhadap operasional perusahaan. Implikasinya termasuk potensi pemberhentian karyawan dan penurunan daya saing industri dalam negeri akibat lonjakan biaya produksi.

Menurutnya, sekitar 3 juta pekerja saat ini menggantungkan hidup pada industri TPT. Oleh karena itu, penerapan BMAD berisiko menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara masif jika perusahaan tak lagi mampu mempertahankan produksi. Ia juga menyoroti bahwa efek lanjutan dari kebijakan ini bisa berdampak pada pendapatan negara dan kestabilan sektor industri secara keseluruhan.

Perbedaan pandangan antara pelaku industri hulu dan pengamat kebijakan menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi industri tekstil Indonesia. Di tengah upaya menjaga keberlangsungan industri nasional, pemerintah dituntut untuk menimbang secara cermat manfaat dan risiko dari kebijakan antidumping agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi mata rantai industri tekstil secara keseluruhan.

Ketegasan Pemerintah Diuji dalam Perlindungan Industri Tekstil Nasional dari Serbuan Impor Dumping

Kondisi industri tekstil nasional saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir asal China. Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani, menyayangkan lambatnya respons pemerintah dalam memberikan kepastian terkait pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang POY-DTY asal China. Menurutnya, penundaan ini telah menimbulkan dampak serius, mulai dari gulung tikarnya dua pabrik dalam negeri hingga terhambatnya investasi senilai USD 250 juta atau sekitar Rp 4 triliun.

Sripeni menegaskan bahwa Indonesia memiliki semua elemen penting untuk memperkuat sektor industri hulu, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang sudah terbukti, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Namun, tanpa kepastian regulasi dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah, potensi ini tidak akan berkembang maksimal. Ia menyebut bahwa revitalisasi industri yang sudah ada bisa dilakukan dengan cepat, asalkan ada kepastian dan keberanian mengambil keputusan strategis.

Temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dari Kementerian Perdagangan yang mengonfirmasi adanya praktik dumping semakin menguatkan urgensi perlindungan terhadap industri lokal. Praktik dumping tidak hanya merugikan produsen dalam negeri, tetapi juga menghambat realisasi investasi sektor hulu yang strategis. Dalam konteks ini, BMAD bukan sekadar tarif tambahan, melainkan bagian dari upaya

menjaga kedaulatan industri nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Sripeni juga menyoroti pentingnya sinyal jelas dari pemerintah kepada pelaku industri dan investor. Ketidakjelasan arah kebijakan membuat iklim usaha tidak kondusif dan menyebabkan pelaku industri dalam negeri kehilangan daya saing. Ia mengkritik kondisi saat ini, di mana industri yang telah berjalan justru terancam berhenti, sementara pelaku asing terus mendapatkan berbagai kemudahan.

Lebih jauh, Sripeni menautkan persoalan ini dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan swasembada energi. Menurutnya, cita-cita tersebut tidak akan tercapai jika fondasi industri nasional, khususnya di sektor hulu seperti tekstil, tidak diperkuat. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki ekosistem tekstil lengkap dari hulu hingga hilir, dan potensi ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal.

Sripeni juga menyinggung peluang pengembangan industri energi berbasis batubara yang belum dimaksimalkan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia masih mengekspor batubara ke China, yang kemudian diolah menjadi metanol dan diimpor kembali dengan harga tinggi. Padahal, Indonesia bisa mengolah batubara kalori rendah menjadi metanol sendiri untuk keperluan produksi biodiesel atau DME (dimethyl ether) sebagai substitusi LPG. Menurutnya, pengembangan industri seperti ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan lapangan kerja baru.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara konsisten sebagai upaya perlindungan dan penguatan

industri nasional. Tanpa keberpihakan yang nyata dan tegas dari pemerintah, cita-cita kemandirian industri akan sulit diwujudkan dan Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang dominasi produk impor yang merugikan.

Dorongan Gas Murah untuk Industri Tekstil Demi Hadapi Serbuan Impor dan Tuntutan Energi Hijau

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia terus memperjuangkan akses terhadap harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing di tengah tekanan berat dari produk impor dan tren global menuju energi hijau. Hingga kini, regulasi Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 baru menetapkan tujuh sektor industri sebagai penerima HGBT, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Padahal, industri TPT juga merupakan sektor padat karya yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi utama.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa pengajuan dari industri tekstil untuk mendapatkan HGBT belum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Meskipun sebagian industri hulu yang memproduksi bahan baku seperti polimer telah menerima HGBT, manfaatnya belum dirasakan secara maksimal karena keterbatasan dalam alokasi gas, yaitu hanya sekitar 60 persen dari kontrak, sedangkan sisanya masih dikenakan harga normal yang jauh lebih tinggi. Bahkan, sebagian industri harus membeli gas dengan harga regasifikasi sebesar US\$17 per MMbtu, dibandingkan dengan HGBT sebesar US\$7 per MMbtu.

APSyFI mendorong agar HGBT bisa diberikan penuh 100 persen sesuai kontrak, guna meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya energi yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar industri tekstil. Biaya tinggi ini diperparah dengan masuknya produk tekstil impor murah yang semakin agresif di pasar domestik. Tanpa efisiensi biaya energi, produk tekstil dalam negeri sulit bersaing baik dari segi harga maupun keberlanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwan, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur gas bumi, khususnya sambungan pipa gas ke wilayah sentra industri tekstil seperti Bandung Raya dan Solo Raya. Ia menyayangkan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah, distribusinya masih belum menjangkau pusat-pusat industri TPT, sehingga pelaku industri tidak dapat memanfaatkan potensi energi bersih tersebut.

API juga mencatat bahwa Indonesia tergolong sebagai negara dengan harga gas yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara pesaing utama di industri tekstil seperti Bangladesh, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara tersebut telah menikmati harga gas yang lebih rendah, sehingga mereka mampu memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera merevisi kebijakan HGBT agar mencakup sektor tekstil dan mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi. Langkah ini bukan hanya untuk menyelamatkan industri TPT dari tekanan impor, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi energi menuju produksi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Merayakan Jejak Budaya Melalui Wastra di Museum Tekstil Jakarta



Museum Tekstil Jakarta kembali menyajikan kekayaan budaya Indonesia lewat pameran bertajuk Catur Kultur pada Wastra Indonesia, yang menampilkan 98 wastra langka sebagai bukti akulturasi budaya dari China, India, Islam, dan Eropa. Berlangsung selama satu bulan penuh, pameran ini menjadi panggung bagi berbagai bentuk kain tradisional seperti kain panjang, sarung, selendang, ikat kepala, hingga kain tokwi khas warga Tionghoa, yang kini jarang ditemukan.

Pameran ini bukan sekadar unjuk rupa keindahan kain, namun menjadi bentuk nyata pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, M. Miftahulloh Tamary, menekankan bahwa warisan budaya seperti wastra tradisional memuat filosofi mendalam dari tiap daerah di Indonesia. Di balik ragam warna dan motifnya, terkandung cerita dan makna yang menjadi identitas budaya bangsa.

Keberagaman yang ditampilkan dalam pameran ini mencerminkan betapa akulturasi budaya tidak mengikis jati diri budaya lokal, tetapi justru memperkaya kekayaan warisan bangsa. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Himpunan Wastraprema, Neneng Iskandar. Ia menyampaikan bahwa motif-motif dalam wastra Indonesia merupakan hasil adaptasi kreatif dari

pengaruh luar yang diolah masyarakat secara khas.

Motif naga, burung hong, bunga peony, dan simbol keberuntungan dari kebudayaan China banyak ditemukan dalam wastra, khususnya yang terinspirasi dari keramik China yang tersebar di Nusantara. Sementara itu, pengaruh India tercermin dari motif patola yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, serta struktur desain kain yang menyerupai pola tradisional India tersebut.

Pengaruh Islam terlihat dalam penggunaan kaligrafi dan simbol religius seperti masjid dalam batik dan sulaman. Hal ini menambah dimensi spiritual dan identitas agama dalam motif wastra. Tidak kalah menarik, unsur budaya Eropa pun turut memberi warna, seperti lambang kerajaan, malaikat, dan cupid yang banyak ditemukan dalam kain tenun dari Indonesia Timur.

Museum Tekstil, sebagai institusi pelestari budaya wastra, terus menjalankan perannya dalam menyebarkan pengetahuan dan membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap kain tradisional Indonesia. Kepala Unit Pengelola Museum Seni, Sri Kusumawati, berharap kehadiran pameran ini menjadi inspirasi terutama bagi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui wastra.

Pameran ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya tidak hanya harus dilestarikan, tetapi juga dipahami maknanya dan dijadikan sumber inspirasi dalam kehidupan modern. Melalui wastra, Indonesia tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga merayakan identitasnya yang kaya dan majemuk.

Jerat Hukum Kredit Macet Sritex: Eks Pejabat Bank Diperiksa Kejagung



Kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Terbaru, dua mantan pejabat PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah BK, yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Komersial Kantor Pusat BRI pada 2017, dan DN, eks Kepala Divisi Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan BRI tahun 2015. Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Selain dari BRI, penyidik turut memanggil tujuh saksi lain dari sejumlah bank daerah. Empat orang berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), yaitu UK selaku Account Officer Korporasi 1, VSD sebagai Corporate Credit Manager, NA yang menjabat Direktur Komersial dan UMKM, serta RNL sebagai Pimpinan Grup Korporasi 1 periode 2020. Sementara tiga saksi lainnya merupakan pejabat dari Bank DKI dan Bank Jateng.

Kejaksaan mengungkap bahwa kasus ini tak hanya melibatkan kredit dari masing-masing bank, tetapi juga pemberian kredit melalui skema sindikasi antara BRI, BNI, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hingga kini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama Bank DKI

periode 2020 Zainuddin Mappa, dan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB periode 2020 Dicky Syahbandinata.

Sritex, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, resmi dinyatakan pailit pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diketok dalam rapat kreditur sehari sebelumnya, menandai akhir dari kiprah perusahaan yang pernah berjaya di sektor tekstil.

Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, terungkap bahwa Sritex meninggalkan total kredit bermasalah sebesar Rp 3,5 triliun hingga Oktober 2024. Rinciannya meliputi Rp 395,6 miliar dari Bank Jateng, Rp 543,9 miliar dari Bank BJB, Rp 149 miliar dari Bank DKI, serta sekitar Rp 2,5 triliun dari kredit sindikasi. Skandal ini menjadi sorotan tajam atas lemahnya tata kelola pemberian kredit di sektor perbankan dan memperlihatkan dampak besar praktik korupsi terhadap stabilitas ekonomi.

Ancaman PHK Massal di Industri Tekstil: Impor Ilegal Jadi Biang Keladi

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional tengah menghadapi ancaman serius. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengungkapkan bahwa jutaan pekerja di sektor ini terancam kehilangan pekerjaan akibat kondisi industri yang kian memburuk. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas industri tekstil tanah air.

Pertama, menurunnya permintaan baik dari pasar domestik maupun luar negeri membuat hasil produksi pabrik-pabrik tekstil tidak terserap. Ristadi menyoroti bahwa produk dalam negeri kesulitan bersaing di pasar lokal yang sudah dibanjiri barang-barang tekstil dari luar negeri dengan harga

yang jauh lebih murah. Fenomena ini banyak terjadi di pusat-pusat perdagangan seperti Tanah Abang dan Cirebon, di mana barang impor ilegal mendominasi rak-rak toko.

Kedua, maraknya praktik impor ilegal membuat produk lokal semakin terpinggirkan. Ristadi menyebut banyak toko mendapatkan barang-barang tersebut melalui pasar gelap, dengan harga jauh di bawah standar. Akibatnya, sejumlah pabrik dalam negeri terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing secara harga dan terus mengalami penurunan permintaan.

Ironisnya, meskipun pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk memberantas impor ilegal, langkah-langkah yang diambil dinilai belum menunjukkan hasil yang nyata. Ristadi menilai penanganan yang dilakukan terkesan setengah hati. Ia mempertanyakan mengapa dalam berbagai pengungkapan hanya barang bukti yang diungkap, sementara pelaku dan importirnya tak pernah terekspos ke publik.

Saat ini, terdapat sekitar tiga juta pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tekstil dan produk turunannya. Jika praktik impor ilegal terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas, maka jutaan pekerja tersebut berada dalam bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Dari sisi pelaku industri, Ristadi memahami bahwa tekanan ekonomi membuat beberapa pengusaha garmen akhirnya memilih untuk ikut menggunakan barang impor ilegal agar bisa bersaing di pasar. Tanpa strategi tersebut, mereka sulit bertahan menghadapi gempuran barang-barang murah dari luar negeri yang telah menguasai pasar domestik.

Banjir Impor Ilegal Ancam Nasib Jutaan Pekerja Tekstil



Gelombang masuknya barang impor ilegal ke Indonesia kini menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan industri padat karya, terutama sektor tekstil, sandang, dan kulit. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memperkirakan sekitar 3 juta pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan akibat serbuan barang-barang murah dari luar negeri, baik berupa bahan baku seperti benang dan kain, maupun produk jadi tekstil.

Ketua Umum KSPN, Ristadi, menyoroti bagaimana pasar domestik kini dibanjiri barang impor yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan produk dalam negeri. Keadaan ini memaksa pengusaha garmen untuk ikut mengimpor bahan baku agar tetap bisa bersaing di pasar. Menurutnya, keputusan itu terpaksa diambil demi mempertahankan kelangsungan bisnis, meski pada akhirnya justru memperlemah industri lokal.

Ristadi menilai fenomena ini menciptakan dilema besar bagi produsen dalam negeri. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan harga dari barang-barang ilegal yang membanjiri pasar, di sisi lain mereka kesulitan menjual hasil produksinya karena kalah bersaing dari segi harga. Kondisi ini menyebabkan turunnya produktivitas, berkurangnya pesanan, dan akhirnya mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan merumahkan pekerja bahkan menutup pabrik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pusat-pusat perdagangan besar seperti Tanah Abang sudah dikuasai oleh produk impor, sehingga produsen lokal semakin kehilangan ruang gerak. Jika tidak segera diatasi, situasi ini tak hanya akan menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil, tapi juga berpotensi merambat ke sektor padat karya lainnya.

KSPN mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas terhadap praktik impor ilegal yang dinilai sudah berlangsung terlalu lama dan seolah dibiarkan. Tanpa campur tangan serius dari pihak berwenang, industri padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia bisa terpuruk lebih dalam, dan mimpi kemandirian industri dalam negeri pun kian jauh dari kenyataan.

Intresse, Wajah Baru Modest Fashion Lokal Berbasis Teknologi Tekstil



Dalam persaingan industri fesyen yang semakin dinamis, kehadiran brand lokal dengan identitas kuat menjadi kunci untuk tetap relevan dan diminati. Intresse adalah salah satu contoh sukses brand modest wear yang mampu mencuri perhatian lewat kombinasi harmonis antara warisan budaya Nusantara dan pendekatan modern berbasis teknologi tekstil.

Didirikan oleh Fanny Kurniawan pada tahun 2001, Intresse telah berkembang menjadi salah satu pilihan utama dalam modest

fashion pria dan wanita di Indonesia. Semangat dan dedikasi pendirinya kini diteruskan oleh sang putri, Susanne Melvina, yang memimpin sebagai Direktur Operasional sejak usia 28 tahun. Di bawah arahnya, Intresse memperkuat posisinya sebagai brand lokal yang tidak hanya menjual busana, tetapi juga menawarkan pengalaman berpakaian yang sarat makna budaya dan inovasi.

Intresse terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat akan busana yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetik dan berkelanjutan. Komitmen terhadap inovasi tercermin dari penggunaan teknologi tekstil dalam proses produksi. Bahan-bahan berkualitas tinggi seperti katun, rayon, linen, hingga katun bambu dipilih karena daya tahan dan kenyamanannya, sekaligus mendukung upaya ramah lingkungan. Pilihan ini menegaskan posisi Intresse sebagai brand yang peduli terhadap kualitas dan keberlanjutan.

Keistimewaan lain dari Intresse terletak pada teknik produksi yang mengedepankan keaslian. Alih-alih menggunakan teknik printing, setiap koleksi dibuat dari kain tenun dengan tekstur khas yang memberi kesan eksklusif dan autentik. Motif-motif yang digunakan juga bukan sekadar ornamen, melainkan representasi kekayaan budaya lokal. Koleksi seperti "Pesona Timur" menjadi bukti bagaimana inspirasi dari bordir khas Indonesia Timur dapat disulap menjadi karya fashion modern yang elegan.

Melalui konsistensi kualitas, pemanfaatan teknologi, dan kecintaan terhadap budaya, Intresse membuktikan bahwa brand lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di industri modest fashion nasional bahkan global. Lebih dari sekadar label, Intresse hadir sebagai representasi kebanggaan akan identitas Indonesia dalam wujud yang segar, modern, dan visioner.